area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 1 4 5

H.2 [X] Pembetulan Ke- 0 H.3 [ ] Pembatalan

H.4 [ ] PPh Final

H.5 [X] PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : 80 820 685 8 542 000

A.2 NIK :

A.3 Nama : DELTA NEVA ANGKASA (DENEVA)

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
1-2024	24-104-27	2.268.000,00		2	45.360,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Penyimpanan, Pengolahan dan/atau Penyaluran Data, Informasi, dan/atau Program

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 1472904

Nama Dokumen Invoice Tanggal 15 dd 01 mm 2024 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :

Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 [ ] PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).

Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 [ ] PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 [ ] PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 [ ] PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : 42 442 101 4 076 000

C.2 Nama Wajib Pajak : AUTO MAJU SENTOSA

C.3 Tanggal : 15 dd 01 mm 2024 yyyy

C.4 Nama Penandatangan : ANDEE YOPHIENOES YOESTONG

C.5 Pernyataan Wajib Pajak :

Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik

Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:

[ ] Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

[V] Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

QX907DSQ

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.